

Saya Terpaksa Mencalonkan Diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Mewakili DKI Jakarta



VISION

INDONESIA MERDEKA 100%

Daulat Rakjat Sepenuhnya melalui Demokrasi Tanpa Partai

MISSION POSSIBLE

kuasa formal



Teguh Sugiharto, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, penggagas DTP, dll.
hp: 08179923479, email: antipartai@yahoo.com, [facebook.com/tenguhonly](https://www.facebook.com/tenguhonly)

<http://facebook.com/groups/tanpapartai>

www.antipartai.wordpress.com

Question: Terpaksa mencalonkan diri...?

Answer: Ya, karena saya melihat kemenangan Jokowi - Ahok. Juga kemenangan golput di banyak tempat sebagai bukti nyata bahwa asumsi sistem demokrasi kita saat ini, Suara Partai = Suara Rakjat, tidak memiliki berlaku lagi. Oleh karena itu sudah seharusnya kita menggeser medan kompetisi demokrasi dari partai menjadi individu perorangan. Namun ini tidak berarti partai harus dibubarkan karena prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul harus kita jaga bersama. Perjuangan DTP adalah menghapus KUASA FORMAL partai dalam menentukan kandidat jabatan publik apapun juga. Ini bukan soal calon independen di samping calon (terjajah?) partai. Tetapi tentang seluruh calon adalah independen.

Jadi begini: kandidat presiden ditentukan oleh Partai. Kandidat anggota DPR juga ditentukan partai. Partai dikendalikan oleh elite-nya yang memiliki kekuasaan memecat anggota DPR dan sebagainya. Artinya, pada dasarnya nasib bangsa diserahkan pada petinggi partai meski berada di luar struktur negara sekalipun.

Nah, partai sebagai sebuah organisasi membutuhkan biaya hidup yang sangat besar. Darimana duitnya kalau bukan dari sumbangan pribadi-pribadi kaya. Nah, kuasa-politik mau tidak mau akhirnya berselingkuh dengan kuasa-modal untuk mempertahankan hidupnya. Dus, pada akhirnya kuasa-modal lah yang mengendalikan segala-galanya di negeri ini.

Saya sudah siapkan Draft Konstitusi Demokrasi Tanpa Partai guna mewujudkan Daulat Rakjat Sepenuhnya. Silakan diunduh di blog saya (<http://antipartai.wordpress.com>). Pelajari dan bandingkan dengan UUD 1945 yang saat ini berlaku. Berikan saran penyempurnaan sebelum nanti kita tuntutan Referendum Konstitusi.

Maka, akhirnya terpaksa saya maju DPD untuk memperoleh jabatan dan uang halal dari jabatan tersebut. Saya juga menyarankan kepada kawan-kawan untuk maju DPD dari daerah masing-masing agar nanti kita bisa saling mendukung mewujudnya visi dan misi kita bersama.

Question: Nyari jabatan? Nyari duit?

Answer: Ya...! Kalau saya jadi anggota DPD RI apalagi terpilih sebagai Wakil Ketua MPR RI maka saya memiliki aspek otoritas untuk lebih didengarkan. Gagasan Demokrasi Tanpa -kuasa formal- Partai tidak lagi dipandang sebagai sampah demokrasi. Suara protes rakjat demi mewujudnya Indonesia Merdeka 100% dapat saya suarakan lebih nyaring. Apalagi kalau kawan-kawan satu visi juga terpilih maka semakin nyaring suara Tanpa Partai. Selama ini juga banyak tetapi itu hanya sebatas di dunia maya saja, dampaknya masih kurang. Dengan otoritas jabatan maka riak bisa menjadi gelombang. Dari gelombang bisa menjadi badai perubahan.

Ya...! Kalau jadi maka saya ada pendapatan dari jabatan yang cukup besar untuk membiayai sosialisasi Konstitusi DTP. Saya ingin melibatkan rakjat dalam pembahasan dan penyempurnaan draft yang sudah saya siapkan. Membiayai pendidikan publik, turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, membantu aktivis yang hendak demonstrasi menyuarakan kehendak rakjat, dan sejenisnya. Saya akan publikasikan laporan penggunaan uang tersebut secara terbuka. Siapapun boleh memeriksanya.

..... SAYA SANGAT MENYARANKAN ANDA UNTUK JUGA MAJU DPD RI DARI PROPINSI LAIN DENGAN VISI, MISI DAN TUJUAN SAMA.

Question: Apakah ada pakar hukum Tata Negara yang menerima konsepsi Demokrasi Tanpa –kuasa formal- Partai...?

Answer: Kalau yang pernah jumpa langsung dan memberikan dukungan serta apresiasi dan saran penyempurnaan ya pengamat konstitusi *Prof. Tisnaya Kartakusumah*, yang seringkali mengatakan bahwa kita ini tak punya Hukum Tata Negara, yang ada itu *Hukum Tata-keledai Negara* bukan Negara Keledai lho... ☺ Sama satu lagi **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie** mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu yang mengatakan: **“DTP: Sebuah gagasan liar, patut diapresiasi dan didukung. Saya sangat suka”**. Kalau saya jadi DPD RI maka akan saya pasang sebagai iklan di media massa nasional. Saya buat sidang-sidang rakjat membahas draft DTP. Pada saatnya nanti kita majukan petisi dan tuntutan **Referendum Konstitusi**.

Question: DPD bisa diharapkan...?

Answer: Tidak...! Siapa yang mengharapkan DPD bisa ini dan itu? DPD itu sejenis macam ompong yang dicabut taringnya oleh tangan-tangan partai bahkan dari kelahirannya. Semua yang sudah baca UUD 1945 harusnya memahami bahwa DPD adalah sejenis macan ompong. Maka saya hanya mencoba mengambil tampang ke-macan-annya saja. Agar wacana DTP tidak lagi dipandang sampah, agar ada duit untuk membiayai ini dan itu yang sudah saya sebutkan di atas to.... Malahan dalam draft Konstitusi DTP sudah saya uraikan gagasan tentang dihapuskannya DPR juga MPR dan DPR. Kita harus melakukan perubahan besar dan itu termasuk menggugat sakralitas terminologi-terminologi politik kita. Lembaga perwakilan rakjat akan disebut dengan Kongres Rakjat Indonesia, sistem distrik murni, satu distrik satu wakil sehingga jelas pertanggungjawaban dan arahnya. Sehingga tidak terjadi lagi partisipasi terputus (*participatus interuptus*).

Question: Lha terus untuk ke-DPD-annya sendiri gimana...?

Answer: DPD itu macan ompong...! Hanya punya hak memberi pertimbangan kepada DPR RI (yang dulu mencabuti taring DPD sejak lahirnya, yang dulu mengebiri DPD sejak awal kelahirannya) dalam sejumlah bidang yang sangat terbatas. Maka konsepsi yang akan saya perjuangkan dalam bidang terbatas itu sudah pula saya uraikan di draft Konstitusi DTP yang bisa diunduh dari <http://antipartai.wordpress.com> antara lain:

*)Pengelolaan Sumber Daya Alam: +)Meningkatkan penguasaan dan bagian negara, +)Sebagai pemilik sah menurut konstitusi maka rakjat harus pula mendapatkan bagian langsung tunai dari pengelolaan kekayaan alam ini.

*)Pajak: +)Yang kaya harus bayar pajak makin banyak, +)Menghapus doktrin kerahasiaan pajak yang banyak digunakan untuk melindungi hasil *copetan*, juga *permukahan* petugas dan wajib pajak.

*)Agama: kemerdekaan beragama maksudnya adalah agama apapun juga, karena negara ini kitab suci-nya ya konstitusi yang jelas-jelas mewajibkan negara melindungi kemerdekaan beragama dan beribadah setiap warga negaranya tak peduli betapa pun sesat dan bodohnya kepercayaan agamanya menurut warga lainnya. Tak boleh ada lagi penghakiman pada keyakinan. Selama bukan tindak kriminal yang merugikan pihak lainnya secara nyata maka negara harus melindungi. Titik...!

*)Pendidikan: +)Mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugas negara, salah satunya lewat pendidikan maka pendidikan adalah termasuk dalam daftar negatif investasi swasta. Maka negara harus membiayai pendidikan warganya hingga setidaknya level strata satu, +)Karena yayasan bukanlah badan usaha, karena pendidikan termasuk dalam daftar negatif investasi maka setiap penyelenggara pendidikan formal harus membuka laporan keuangannya. Hanya penyelenggara pendidikan formal ya... bukan penyelenggara kursus vokasional dan sejenisnya. +)Mengakomodasi dan mengembangkan *homeschooling*.

Nah, jika Anda bersepakat dengan yang hendak saya perjuangkan mari kita berjuang bersama. Harus ada salah satu dari kita yang maju dan menjadi *spokes person*. Untuk Propinsi DKI Jakarta ijin kan saya yang maju. Sebaiknya Anda juga mengajukan diri dari propinsi lain dengan program serupa saya. Nanti kita bahu-membahu di gedung sana...!

UU No. 8 Tahun 2012, Pasal 12, huruf p: “mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.” Pasal 13, ayat 3: “Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.”

Segera fotokopi KTP DKI Jakarta Anda dan keluarga serta kawan. Bubuhkan tanda tangan asli sesuai KTP di bagian bawahnya sebagai tanda memberikan dukungan awal. Satu lembar dukungan sangat bermakna. Segala bentuk dukungan sangat diharapkan agar cita Daulat Rakjat Sepenuhnya segera mewujudkan.

Kontak saya untuk diambil atau kirimkan ke sekretariat pengumpulan dukungan awal d/a:

Herlina Binduni, Jl. Gili Samping VI No. 24 RT 09/03 Kemanggisan, Jakarta Barat 11530